

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menggambarkan bagaimana seorang peneliti untuk mengidentifikasi perbandingan data dan menghasilkan pemikiran pemikiran baru untuk penelitian selanjutnya. Bagian ini merangkum temuan-temuan penting dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan, yakni “Implementasi Kebijakan Program “Bengkulu Bisa” Di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu”.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu, karena keempat penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan mendasar dalam objek kebijakan, skala lokasi, dan focus diri pada implementasi Program Bengkulu Bisa di Kelurahan Panorama, melalui pendekatan *Implementing Public Policy* menurut (Hill & Hupe, 2002) Pendekatan ini memungkinkan penelitian menelaah secara mendalam sebagaimana pelaksanaan, pencapaian, dan penyelesaian terhadap program tersebut. Penelitian pada bidang kebijakan daerah yang memperhatikan bahwa hambatan implementasi sering muncul pada tahap koordinasi, sumber daya manusia, sosialisasi program, dan konsisten pelaksanaan di lapangan.

Dalam konteks “ Bengkulu Bisa”, temuan awal dari pemberitaan dan dokumentasi publik menunjukkan bahwa program ini dijalankan dengan melibatkan kelurahan, masyarakat dalam menjaga kebersihan, keindahan, kesehatan, dan kemanaan lingkungan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rosidin, (2024) dengan judul “Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu”	pendekatan kualitatif	Pasar Minggu Kota Bengkulu merupakan Pasar Tradisional yang ada di Bengkulu melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah pada pasar minggu tersebut. Pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan sampah yang ada di pasar Minggu Kota Bengkulu sudah sepenuhnya dapat memenuhi pencapaian hasil dari indikator implementasi yang diinginkan
2.	titi darmi, (2025) dengan judul “Krisis Sampah Di Kota Bengkulu: Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Bersih Dan Sehat”	Metode kualitatif	menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih belum optimal akibat lemahnya komunikasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang tidak efisien. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sangat rendah karena kurangnya edukasi, insentif, dan fasilitas pendukung. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas birokrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat secara lebih

			partisipatif untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
3.	Lestari et al., (2025) dengan judul “Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengembangan Taman Hutan Raya Rajo Lelo Di Kabupaten Bengkulu Tengah”	Metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH telah menjalankan peran aktif melalui perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi pengembangan Tahura, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Dalam peran partisipatif, DLH telah menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pihak eksternal, namun belum berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Sementara itu, peran pasif terlihat dari minimnya pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang mengalihfungsikan lahan Tahura, yang dapat mengancam keberlangsungan fungsi konservasi. Secara keseluruhan, peran DLH dalam pengembangan Tahura Rajo Lelo sudah terlihat, namun masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan kawasan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat lingkungan serta ekonomi bagi masyarakat sekitar.
1.	(Rahmadani, 2024) dengan judul “Analisis Pengelolaan Sampah Di Pasar	Metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Pasar Kecamatan Bangkinang Kota menunjukkan para pedagang secara keseluruhan serta masyarakat disekitar pasar belum ada melakukan pengurangan timbulan sampah,

			pendauran ulang sampah dan pemanfaatan sampah pasar kembali. Dalam tahap pengelolaan sampah jenis tempat sampah yang ada belum sesuai standar serta tempat pemilahan sampah organik dan anorganik juga masih minim keterse
--	--	--	---

Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu, karena secara khusus memfokuskan diri pada implementasi program “Bengkulu Bisa” berfokus pada kebersihan di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Pendekatan *Implementing Public Policy* menurut (Hill & Hupe, 2002).

Pendekatan ini memungkinkan penelitian menelaah secara mendalam bagaimana kebijakan pemerintah, pelaksanaan, pencapaian, dan penyelesaian. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang secara umumnya membahas biasanya hanya deskripsi partisipasi atau kondisi fisik tanpa aturan, sanksi atau hadiah, penelitian ini membahas implementasi kebijakan baru yang mempunyai kompetensi, sanksi, penghargaan, gotong royong, sehingga lebih komprehensif, terukur, dan relevan dengan teori implementasi kebijakan publik.

Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu mengelola proses kebijakan dalam program yang dijalankan, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada akurasi kebersihan lingkungan. Dengan demikian penelitian ini menawarkan implementasi kebijakan program “Bengkulu Bisa” di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dalam bingkai kapasitas

kebijakan daerah, suatu aspek yang masih minim di teliti dan menjadi celah penting dalam literatur kebijakan di Indonesia khususnya di Kota Bengkulu.

2.2. Kerangka Konsep Dan Landasan Teori

2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan karena pada tahap ini keputusan pemerintah diwujudkan dalam tindakan nyata. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan dampak apabila tidak diimplementasikan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, implementasi dapat dipahami sebagai proses penerjemahan tujuan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat. (Ii et al., 1998)

Hill & Hupe, (2002) menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi antara harapan kebijakan dan hasil kebijakan. Definisi ini menunjukkan bahwa implementasi bukan sekadar pelaksanaan administratif, melainkan proses yang dipengaruhi oleh aktor pelaksana, struktur organisasi, koordinasi, dan kondisi sosial di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi Program Bengkulu Bisa di Kelurahan Panorama menjadi penting untuk dikaji karena keberhasilan program sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan pada tingkat lokal.

2.2.2. Teori *Implementing Public Policy* Michael Hill dan Peter Hupe 2002

Michael Hill dan Peter Hupe dalam buku *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice* menjelaskan bahwa implementasi kebijakan harus dipahami dalam kerangka tata kelola (*governance*) yang dinamis. Mereka memandang implementasi sebagai proses yang tidak linier, karena kebijakan dalam praktiknya selalu berinteraksi dengan berbagai aktor, kepentingan, dan kondisi kelembagaan

Teori implementasi kebijakan Hill & Hupe, (2002) menawarkan kerangka analisis komprehensif untuk memahami bagaimana kebijakan public dijalankan di lapangan. Hill dan Hupe menolak pandangan sempit bahwa implementasi hanya soal “ mengikuti intruksi dari atas”, mereka menekankan implementasi sebagai proses *governance* yang melibatkan banyak actor, hubungan antar organisasi serta respons kelompok sasaran. Dalam pandangan Hill dan Hupe, terdapat tiga fokus utama dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Mengelola proses kebijakan yaitu : Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan operasional. Pada tahap ini, penting untuk melihat sejauh mana tujuan program dipahami oleh pelaksana, bagaimana prosedur dijalankan, dan apakah kegiatan sesuai dengan arah kebijakan.

2. Mengelola hubungan antarorganisasi yaitu : Dimensi ini menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi atau antaraktor yang terlibat dalam implementasi. Dalam Program Bengkulu BISA, hubungan antara pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, dan unsur masyarakat menjadi bagian penting agar pelaksanaan program berjalan efektif. Mengelola
3. hubungan internal dan eksternal organisasi yaitu : Dimensi ini melihat bagaimana organisasi pelaksana membangun relasi dengan lingkungan luar, sekaligus menjaga koordinasi di dalam organisasi. Hubungan ini mencakup komunikasi, pembinaan, pengawasan, dan dukungan dari pihak eksternal maupun internal agar implementasi kebijakan berjalan baik.



2.2.3. Program Bengkulu Bisa

Program Bengkulu Bisa merupakan program pemerintah daerah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan partisipasi publik. Program ini menjadi bentuk kebijakan yang berorientasi pada penguatan peran masyarakat dan pemerintah lokal dalam mendukung kemajuan Kota Bengkulu. Dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Di Kelurahan Panorama, Program Bengkulu Bisa menjadi penting karena wilayah ini memiliki karakter masyarakat yang cukup heterogen dan membutuhkan pendekatan implementasi yang adaptif. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari adanya kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana tujuan program dapat tercapai dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kajian terhadap program ini perlu diarahkan pada aspek implementasi, bukan hanya pada aspek perumusan kebijakan.

Tujuan kegiatan launching Bengkulu BISA ini adalah bagaimana pemerintah hadir untuk mewujudkan Kota Bengkulu menjadi lebih bersih dan lebih baik. Kita menyadari bahwa permasalahan terkait sampah dan turunannya itu menjadi persoalan yang tidak bisa kita anggap remeh. keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah tidak menjadi alasan untuk tidak berbuat. Justru kolaborasi bersama sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan kota yang idel.

Karena bagaimanapun situasi dan kondisi saat ini, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, tentu diharapkan semua stakeholder, semua elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga tokoh muda, harus bersinergi. Kita harus sama-sama mewujudkan BengkuluKu BISA ini. (Lubis, 2025)

Sebagai bentuk nyata dari program Bengkulu BISA (Bersih, Indah, Sejuk, dan Asri), warga RW 01 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, gelar gotong royong (GORO) kebersihan lingkungan. Goro yang digerakkan langsung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Program Bengkulu BISA bukan sekadar slogan, tapi merupakan aksi nyata untuk menumbuhkan rasa memiliki pada lingkungan.

Kalau warga merasa memiliki, maka warga akan lebih peduli dan turut menjaga kebersihan. Dalam kesempatan itu, dia juga mengajak warga Masyarakat untuk terus aktif dukung program Bengkulu BISA. Bahwa lingkungan yang bersih akan tercipta kehidupan yang lebih sehat, nyaman, dan membahagiakan. Allba, (2025)

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini menggunakan teori *Impelementing Public Policy* Hill & Hupe, (2002), sebagai kerangka teoritis utama. Hill dan Hupe memandang sebagai proses yang melibatkan pelaksanaan, pencapaian, dan penyelesaian. Dalam konteks penelitian, implelementasi program “Bengkulu Bisa” di rumuskan oleh pemerintah Kota Bengkulu sebagai kebijakan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sejuk dan asri, dengan focus pada pengelolaan sampah, penataan lingkungan dan penguatan partisipasi masyarakat.

Kebijakan publik merupakan instrument pemerintah dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Bengkulu adalah Program “Bengkulu Bisa”, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan mendorong partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan, melainkan sangat bergantung pada proses implementasinya di lapangan. Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan kebijakan oleh organisasi pelaksana agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari isi kebijakan itu sendiri, kapasitas pelaksana, maupun kondisi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka analisis yang mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Hill & Hupe, (2002) sebagai landasan analisis. Menurut Hill & Hupe, (2002) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu Mengelola Kebijakan, Mengelola hubungan antarorganisasi & Mengelola hubungan internal dan eksternal organisasi.

Kebijakan ini kemudian di turunkan ke level kelurahan, melalui intruksi teknis, alokasi dana, dan program gotong royong kebersihan, serta berbagai kegiatan lomba lingkungan yang di koordinasikan oleh kelurahan, RW/RT dan LPM. Setelah dirumuskan kebijakan “Bengkulu Bisa” dijalankan oleh organisasi pelaksanaan di Kelurahan Panorama, yaitu pemerintah Kota Bengkulu (formulator kebijakan), Kelurahan Panorama (lurah, RW/RT), LPM kelurahan, Masyarakat (karang taruna).

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Bengkulu Bisa berdasarkan teori Hill & Hupe, (2002) sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi perbaikan pelaksanaan kebijakan di tingkat kelurahan.

Kerangka Berfikir

